

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Fungsi Transportasi (Regional dan Lokal) Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Dari sini timbul jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan (trans-portasi) dari satu tempat ke tempat lain. Di sini terlihat, bahwa transportasi dan tata guna lahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi salah satu tujuan penting dari perencanaan tata guna lahan atau perencanaan sistem transportasi, adalah menuju ke keseimbangan yang efisien antara potensi tata guna lahan dengan kemampuan transportasi.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, terkadang menjadikan manusia melupakan aspek keselamatan, hal tersebut bisa terjadi karena, di dalam praktiknya sering kali kita temui, bahwa fungsi atau kegunaan alat transportasi tidak diperuntukan dengan semestinya. Sebagai contoh kasus di beberapa wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Timur, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas, yang disebabkan oleh penggunaan sarana transportasi angkutan barang seperti mobil bak terbuka yang dijadikan sebagai alat untuk mengangkut manusia, hal inilah yang kemudian dapat memicu terjadinya kecelakaan. Tentu efeknya tidak hanya menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di jalan raya, akan tetapi bisa menyebabkan

resiko kematian dan juga kerugian secara materil, dan untuk menghindari berbagai kerugian yang terjadi maka UU secara jelas mengatur kondisi tersebut.

Misalnya Sebelum UU No. 22/2009 disahkan, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. UU No 22/2009 menyatakan semua peraturan dalam PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

Melihat potensi pelanggaran lalu –lintas yang sewaktu –waktu dapat terjadi, tentunya hal tersebut harus segera di selesaikan oleh kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan, karena secara yuridis sebenarnya telah diatur dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam undang –undang tersebut secara detail telah diatur dalam pasal 137 ayat 4, seperti pemaparan berikut: “ Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: a). rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; b). untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau c). kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan pasal 137 ayat 4.

Landasan hukum tersebut seharusnya dijadikan dan dilaksanakan sebagai acuan bagi para penegak hukum, khususnya aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang tegas dan konkrit, mengingat potensi pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu ancaman di negara Indonesia, hal tersebut juga dipengaruhi oleh semakin pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang dapat meningkatkan angka penggunaan kendaraan yang semakin besar lagi.

Pada praktiknya, proses penegakan hukum seharusnya dapat dijalankan secara tegas dan optimal, namun karena kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda, terkadang membuat aparat kepolisian menjadi tidak berdaya dalam mengatasi pelanggaran – pelanggaran tersebut, hal ini dapat kita dilihat dari masih tingginya angka pelanggaran lalu – lintas yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa tertantang dan tertarik untuk melakukan kajian dengan mengambil tema: “Tindakan Hukum Kepolisian dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Hukum Resort Kota Pasuruan, (*Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 137 Ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 Mengenai Larangan Mobil Barang untuk Angkutan Orang*)

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian yang akan diangkat, diantaranya:

---

1. Apa motif penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang di wilayah hukum Polsek Pandaan?
2. Apa tindakan kepolisian terhadap penggunaan mobil barang untuk angkutan orang di wilayah hukum Polsek Pandaan?
3. Apa kendala kepolisian dalam penanganan terhadap penggunaan mobil barang untuk angkutan orang di wilayah hukum Polsek Pandaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan permasalahan diatas, peneliti mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif sesungguhnya penggunaan mobil barang yang dijadikan untuk mengangkut orang.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap penggunaan angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut orang.
3. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam menangani penggunaan angkutan barang untuk mengangkut orang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a) Diharapkan mampu memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian terhadap kajian-kajian Ilmu Hukum, yang berkaitan dengan tindakan hukum kepolisian terkait penerapan pasal 137 ayat 4 Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta mendapatkan pengalaman dalam permasalahan yang berkaitan dengan Undang – undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Dengan adanya kajian tentang pasal 137 ayat 4 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat agar mereka menyadari betapa pentingnya penggunaan angkutan barang sesuai dengan kegunaannya, selain itu kajian ini juga bermanfaat bagi anggota kepolisian supaya dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang – undang.

## E. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun masyarakat dan juga rekan-rekan mahasiswa dalam rangka menambah wawasan atau pengetahuan untuk memahami pasal 137 ayat 4 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian artinya cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis)<sup>2</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat efektivitasnya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*)<sup>3</sup>

Di dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Sifat dari penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 57.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, Hal.10.

<sup>4</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal 33.

## 2. Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian ini yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan – bahan yang akurat adalah penelitian yaitu Polsek Pandaan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan turun langsung di wilayah hukum Polsek Pandaan, khususnya bagi tindak pidana pelanggaran seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 137 ayat 4 mengenai penggunaan angkutan barang untuk mengangkut penumpang.

## 3. Sumber Data

Ada beberapa pembagian mengenai sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan).<sup>5</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yaitu anggota kepolisian bagian lalu lintas Polsek Pandaan. Selain itu sumber data primer berupa Undang-undang Republik Indonesia nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta data pelanggaran lalu lintas khususnya yang berkaitan dengan pasal 137 ayat (4).

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 82.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>6</sup> data dalam penelitian ini, adalah data yang berupa dokumentasi yang didapat dari Polsek Pandaan, dan juga berupa informasi-informasi yang diperoleh melalui jurnal-jurnal hukum, hasil karya tulis ilmiah, maupun internet.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).<sup>7</sup>

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dilakukan penulis melalui:

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik pengamatan atau observasi menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sebuah fenomena. Biasanya metode ini tidak terbatas dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, akan tetapi dalam pengumpulan datanya ini dititik beratkan terhadap terjun kelapangan secara langsung dan menjadi partisipan secara langsung.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid 82.

<sup>7</sup>Op.Cit 83.

<sup>8</sup>Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka cipta, Jakarta, Hal 115.



b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan kepada subyek penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan menggunakan sistem random acak dengan mewawancarai anggota polisi lalu lintas wilayah hukum resort kota Pasuruan sebagai respondenya, selain itu peneliti juga mewawancarai pelaku pelanggaran undang-undang nomer 22 tahun 2009 pasal 371 ayat 4 tentang angkutan barang yang dirubah fungsinya sebagai angkutan penumpang atau sebaliknya.

c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

d. Studi Dokumen

Dengan memanfaatkan berbagai bahan dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. di mana dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.<sup>9</sup>

5. Teknik Analisis data

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai sebuah permasalahan yang tidak melalui bilangan

---

<sup>9</sup>Sutopo, H.B, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, Hal 69-70.

statistik, tetapi dengan cara analisis berdasarkan kaidah-kaidah atau norma - norma hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti secara sistematis.

## **G. Rencana Sistematika Penelitian**

Rencana sistematika penulisan dibuat dalam rangka untuk memudahkan proses penulisan karya tulis ilmiah ini, oleh karena itu penulis membagi menjadi 4 (empat) bagian, dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I** Bab I ini memaparkan mengenai adanya kesenjangan antara sebuah produk hukum yang harus dijalankan dengan proses pelaksanaannya dilapangan, sehingga menimbulkan permasalahan yang harus dicari solusinya, oleh karena itu disusunlah tujuan penelitian, supaya dapat dicapai gambaran tentang sejauhmana tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian menyangkut pelanggaran lalu-lintas yang terkait dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, khususnya yang berkenaan dengan penggunaan angkutan barang untuk mengangkut penumpang, seperti yang dijelaskan dalam pasal 137 ayat 1-5.

**BAB II** Bab II penulis akan menguraikan konsep teoritis penelitian secara runut, supaya dapat dipahami dengan jelas. Konsepsi teoritis tersebut yaitu: Tindakan Hukum, Kajian tentang Tindak Pidana pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan, terkait pasal 137 ayat 4 mengenai penggunaan angkutan barang untuk mengangkut

penumpang, ataupun sebaliknya, serta polisi, dan juga angkutan barang dan angkutan penumpang,

**BAB III** Bab III ini akan dibahas bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian wilayah hukum resort Kabupaten Pasuruan terkait dengan Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan hal-hal apa saja yang menjadi motif serta faktor pendukung dan penghambat pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan hukum.

**BAB IV** Bab IV ini akan memaparkan kesimpulan mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat pada Bab I, sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab, selain itu penulis juga akan memberikan rekomendasi berupa saran dan kritik terhadap hal-hal yang menjadi kendala selama proses penelitian.